

Ikhtisar Webinar

G20 dan Prospek Pemulihan Ekonomi Global



G20 dan Prospek Pemulihan Ekonomi Global

1 November 2021 | 10:00 – 12:00 WIB

Webinar mengenai *Group of Twenty* (G20) dan prospek pemulihan ekonomi global ini dipandu oleh Birgitta A. P. Saputro, Analis Maha Data Politik Media, dan dibuka oleh Bapak Makmur Keliat, Senior Fellow Laboratorium Indonesia (LAB 45). Webinar ini menghadirkan tiga narasumber, yakni (1) Reyhan Noor, Analis Kebijakan Ekonomi Politik LAB 45; (2) Yulius Purwadi Hermawan, pakar Hubungan Internasional dari Universitas Katolik Parahyangan (Unpar); dan (3) Faisal Basri, ekonom senior Indonesia.

Sebagai pembicara pertama, Reyhan memaparkan temuan-temuan mengenai jalannya G20, baik dari sisi keanggotaan, maupun dampak terhadap perekonomian secara global. Dalam hal ini, komitmen dan kepatuhan Indonesia terhitung mengalami tren yang positif meskipun masih di bawah rata-rata anggota G20 lainnya. Selama tiga tahun awal keanggotaannya (2008-2010), memang Indonesia memiliki skor kepatuhan negatif. Akan tetapi, Indonesia mulai memiliki skor kepatuhan yang positif sejak tahun 2011 dengan tren yang terus positif dan mencapai puncaknya pada tahun 2017 di mana skornya mendekati angka 1, yang berarti kepatuhan penuh. Melalui analisis silang data antara Agenda G20 dengan lini masa fenomena ekonomi yang terjadi sejak tahun 1980 hingga tahun 2020, kerangka pertemuan G20 terbukti memiliki prioritas untuk membentuk langkah mitigasi maupun pemulihan sebagai respons dari fenomena krisis ekonomi yang terjadi. Sebagai contoh, pada tahun 2009 pertemuan G20 yang diadakan sebanyak dua kali bukanlah untuk menyelesaikan *Global Financial Recession* yang sedang terjadi, melainkan membawa tema resolusi, seperti mereformasi pasar finansial untuk mencegah krisis serupa terulang.

Bergabungnya Indonesia ke dalam keanggotaan G20 juga relatif tidak berpengaruh secara signifikan terhadap dinamika pertumbuhan ekonomi Indonesia. Dalam konteks pandemi COVID-19, Indonesia menerapkan kebijakan yang disebut “Gas dan Rem” untuk menyeimbangkan program pemulihan ekonomi dan perkembangan kasus positif COVID-19. Respons kebijakan ini cenderung menimbulkan pasang surut perekonomian, terukur melalui tiga indikator utama, yakni Produk Domestik Bruto (PDB), Gini Rasio, dan kemiskinan, yang bergantung pada angka kasus positif

COVID-19. Lebih lanjut, analisis posisi Indonesia dalam konteks ekonomi internasional melihat China dan Amerika sebagai dua negara kunci yang dapat membantu pemulihan nasional dengan lebih cepat melalui hubungan perdagangan internasional yang kembali berjalan lancar. Pada pertemuan G20 tahun 2021 di Roma kemarin, Presiden Joko Widodo mengajukan resolusi jangka pendek dan jangka panjang. Langkah yang diajukan sebagai resolusi jangka pendek adalah melakukan reaktivasi konektivitas dan peningkatan akses terhadap rantai pasokan global. Untuk resolusi jangka panjang, solidaritas global dalam penguatan infrastruktur logistik, diversifikasi sumber pasokan, dan penanggulangan risiko proteksionisme perdagangan adalah vital untuk pembangunan berkelanjutan.

Pada awal pemaparan, Purwadi menekankan temuan yang disampaikan oleh Reyhan bahwa hasil agenda G20 lebih kepada "*crisis responder*", yang memang dibuat dengan latar belakang krisis global. Sebelum melangkah lebih jauh, definisi dan indikator yang ideal dalam mengukur pemulihan ekonomi sarat akan perdebatan. Terdapat pandangan yang mengatakan bahwa resesi ekonomi cukup diukur dengan indikator moneter, seperti pertumbuhan ekonomi. Lantas, para analis G20 menegaskan bahwa pemulihan ekonomi tidak cukup hanya menggunakan angka pertumbuhan, tetapi juga kembalinya pekerjaan dan pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat. Hanya saja, menurut Purwadi, perlu diperhatikan bahwa krisis kali ini menjadi lebih menantang. Eksistensi pandemi ternyata menambah kompleksitas ekonomi baru, seperti permasalahan rantai pasok dan pentingnya aspek kesehatan dalam pemulihan global. Pemulihan ekonomi akibat pandemi COVID-19 dihadapkan dengan tantangan yang lebih luas jika dibandingkan dengan resesi finansial tahun 2008. Tidak hanya seputar pemulihan pertumbuhan ekonomi yang kuat, tetapi juga aspek produktivitas, pendidikan, lapangan pekerjaan, dan pertumbuhan yang berkelanjutan berjangka panjang.

Purwadi juga membandingkan target capaian agenda G20 dahulu dengan di masa yang akan datang. Pascakrisis 2008, angka pertumbuhan ekonomi masih belum pulih seperti sebelum krisis disertai dengan angka pengangguran yang masih tinggi, di mana pertumbuhan yang cenderung datar jika dibandingkan dengan pemulihan pascakrisis 1999. Purwadi menyimpulkan bahwa agenda G20 belum mampu untuk berperan besar dalam pemulihan ekonomi global jika dibandingkan dengan besarnya

porsi perekonomian, organisasi dunia, dan lembaga riset yang dimiliki oleh anggota G20. Hal ini disebabkan oleh keengganan negara-negara untuk *all out* dalam membuat kesepakatan sehingga lebih banyak bermain di kata-kata, tetapi kurang banyak bertindak. Pada akhirnya, G20 cenderung responsif, tetapi kurang preventif dan antisipatif. Dalam presidensinya, Indonesia harus meningkatkan perannya tidak hanya sebagai *general agenda setting*, tetapi juga fokus menghasilkan resolusi yang konkret dan realistis. Selain itu, Indonesia juga harus bersikap akomodatif terhadap konteks yang ada dan tantangan-tantangan baru, salah satunya dengan membahas *cross-cutting issues* dengan *dual track*, sehingga tidak hanya terpisah di *sherpa track* dan *finance track*. Di akhir, terdapat empat pilar G20 Action Plan oleh *finance track*, yaitu (1) menanggulangi isu kesehatan; (2) mendukung pemulihan ekonomi melalui kebijakan pendukung; (3) membantu negara dengan ekonomi yang rentan; dan (4) pertumbuhan keberlanjutan menuju *green growth*.

Pemaparan dilanjutkan oleh Faisal Basri yang meninjau kembali dari awal sejarah terbentuknya G20. Sebagai sebuah forum koordinasi ekonomi global dengan sekitar 81% dari PDB dunia, pengaruhnya sangat besar, tetapi bukan berarti G20 dapat merepresentasikan seluruh dunia. Sebagai contoh, Benua Asia masih menjadi minoritas dan Benua Afrika hanya memiliki satu representatif, sedangkan Benua Eropa memiliki representatif ganda dari adanya perwakilan Uni Eropa dan negara-negara Eropa lainnya. Dengan perkembangan dari G7 ke G20, memang seharusnya komposisi grup ini fleksibel, menyesuaikan dengan dinamika ekonomi dunia sehingga ada yang masuk dan keluar. Porsi perekonomian yang cenderung fluktuatif membuat keanggotaan G20 perlu terus dikaji.

Komitmen dan presidensi Indonesia dalam memenuhi agenda G20 perlu digencarkan kembali, terutama terhadap permasalahan lingkungan. Selain proporsi ekonominya yang besar, G20 juga mencakup lebih dari 80% emisi gas rumah kaca dunia dan hanya sepuluh anggota G20 yang dinilai akan mencapai target *Nationally Determined Contributions* (NDC) masing-masing. Indonesia sendiri termasuk ke dalam 10 negara penyumbang emisi terbesar dan memiliki peringkat pertama dalam pertumbuhan emisi karbon tertinggi. Tingkat kesejahteraan Indonesia juga masih di angka 122, berbeda dengan negara-negara anggota lainnya. Dalam konteks pemulihan ekonomi, Indonesia menghadapi tantangan pemulihan yang cenderung lebih berat daripada

anggota G20 lainnya. Dapat dikatakan proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia akan lebih rendah daripada sebelum pandemi. Agenda G20 dirasa masih mengesampingkan kepentingan negara berkembang seperti ASEAN. Pada akhirnya, yang terjadi adalah kemunafikan diplomasi Indonesia, ketika tindakan Indonesia tidak sesuai dengan perkataannya di panggung internasional. Oleh karena itu, Indonesia harus terlebih dahulu memperbaiki urusan domestiknya dan memimpin ASEAN, sebelum dapat menjadi kekuatan yang dipertimbangkan di G20.

Pada sesi tanya jawab, Birgitta menyampaikan pertanyaan dari peserta terkait bagaimana cara untuk mengoptimalkan presidensi G20 Indonesia untuk mencapai kepentingan nasionalnya. Purwadi menanggapi pertanyaan tersebut dengan menekankan bahwa Indonesia harus dapat melakukan *agenda setting* yang baik, dengan mengutamakan kepentingannya dan negara berkembang lainnya, tidak tenggelam dalam pembahasan isu-isu negara maju. Lebih lanjut, Faisal menekankan adanya perbedaan orientasi antarnegara anggota G20, salah satunya adalah kebijakan pajak yang berbeda antara Amerika Serikat dan Indonesia. Pemerintah Indonesia disarankan untuk lebih fokus pada permasalahan domestik daripada terlalu aktif dalam permasalahan negara lain. Presidensi Indonesia di dunia internasional seharusnya menjadi fungsi dari isu domestik atau kepentingan nasional.

Pertanyaan lain yang dibahas pada sesi tanya jawab adalah komitmen *green growth* G20 dan juga tanggung jawab negara-negara maju terhadapnya. Faisal berpendapat bahwa Indonesia perlu mengubah sudut pandang terhadap penanggulangan energi hijau. Saat ini energi hijau yang murah sudah tersedia bagi semua, bukan hanya negara maju. Fokus pemerintah dalam menanggulangi emisi karbon juga perlu difokuskan pada sektor agrikultur, hutan, dan penggunaan lahan yang berkontribusi terhadap dua pertiga emisi karbon Indonesia. Lebih lanjut, menurutnya, jika kita ingin memperpanjang masa guna batu bara, seperti di Rancangan Undang-Undang (RUU) Energi Baru dan Terbarukan (EBT) misalnya ada *liquified* dan *gasified coal*, itu hanya melayani kepentingan oligarki.

Senada dengan Faisal, Purwadi juga setuju bahwa perihal *green growth* menjadi pekerjaan rumah yang berat bagi Indonesia. Namun Purwadi juga melihat bahwa Indonesia bisa mengejar agenda dan memanfaatkan bagian dari *green growth* misalnya seperti *sustainable finance* yang dibahas di *finance track* dan *renewable energy* di *sherpa*

track. Reyhan menambahkan bahwa perhatian pemerintah perlu kembali difokuskan dalam proses konversi ke energi terbarukan baik dalam pengembangannya maupun pengelolaannya. Proses pengembangan dan teknologi menjadi tantangan tersendiri, tetapi pengelolaan energi terbarukan seperti nikel juga menimbulkan tantangan jangka panjang dalam hal pengelolaan limbahnya.



Jl. Mabas Hankam No. T65,
Bambu Apus, Cilangkap, Jakarta Timur.



Senin, 01 November
2021

➔ +62 812 8218 4545

➔ lab45@lab45.id

➔ www.lab45.id